

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG

Dustin Natio Immanuel Sinaga, Tri Yuniningsih

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Karawang Regency, as one of the largest industrial areas in Indonesia, still faces the problem of high unemployment, indicating a mismatch between industrial growth and the absorption of local labor. To address this issue, the Karawang Regency Government established a job opportunity expansion policy through Regent Regulation Number 8 of 2016. This study aims to analyze the implementation of the job opportunity expansion policy and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results show that the policy implementation has been carried out through various programs such as job vacancy information services, job training, and increasing local labor absorption; however, it has not been optimal. This is due to several constraints, including limited resources, ineffective policy communication, and insufficient inter-agency coordination. In addition, field practices indicate inconsistencies in policy implementation, such as administrative manipulation of labor data. Therefore, improving the effectiveness of policy implementation is necessary through strengthening coordination, optimizing resources, and enhancing supervision and public outreach so that the policy objectives in reducing unemployment can be achieved more effectively.

Keywords: *policy implementation, employment opportunities, local labor, unemployment.*

ABSTRAK

Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia masih menghadapi permasalahan tingginya tingkat pengangguran, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan industri dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui berbagai program seperti penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan kerja, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya, komunikasi kebijakan yang belum efektif, serta koordinasi antar instansi yang masih kurang. Selain itu, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan, seperti manipulasi administrasi tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan melalui penguatan koordinasi, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan pengawasan dan sosialisasi agar tujuan kebijakan dalam menurunkan tingkat pengangguran dapat tercapai secara maksimal.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kesempatan kerja, tenaga kerja lokal, pengangguran.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berimplikasi langsung terhadap bertambahnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan pemerintah dalam menyediakan kesempatan kerja yang memadai agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja. Apabila peningkatan jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, maka akan memunculkan permasalahan pengangguran yang berdampak luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pengangguran menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Permasalahan pengangguran di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup kompleks, terutama di provinsi dengan tingkat industrialisasi tinggi. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pusat industri nasional justru menghadapi tingkat pengangguran yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan industri tidak selalu berkorelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesempatan kerja.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di berbagai provinsi di Indonesia. Jawa Barat termasuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat pengangguran yang tinggi, yang menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di wilayah ini bersifat struktural. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tekanan pasar kerja di Jawa Barat tidak hanya disebabkan oleh faktor lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh arus migrasi tenaga kerja dari daerah lain yang mencari peluang kerja di kawasan industri .



Gambar 1 Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia

Sumber: BPS Indonesia (2025)

Dampak dari tingginya tingkat pengangguran di tingkat provinsi tersebut juga tercermin pada kabupaten/kota di dalamnya, termasuk Kabupaten Karawang. Sebagai salah satu kawasan industri terbesar

di Indonesia, Karawang memiliki lebih dari seribu perusahaan yang bergerak di berbagai sektor manufaktur. Namun demikian, kondisi ini tidak diikuti dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal. Bahkan, tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang tercatat sebesar 8,04 persen, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 6,75 persen .

Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan industri, di mana wilayah dengan tingkat industrialisasi tinggi justru memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri (*skill mismatch*), kurangnya akses informasi lowongan kerja, serta lemahnya sistem tata kelola rekrutmen tenaga kerja.

Lebih lanjut, data empiris pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Karawang menempati posisi kelima dengan tingkat pengangguran sebesar 8,04 persen, yang hanya sedikit lebih rendah dibandingkan daerah lain seperti Kota Cimahi dan Kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran di Karawang bukan

merupakan fenomena tunggal, melainkan bagian dari pola struktural yang terjadi di wilayah industri Jawa Barat

Tabel 1 Kota kabupaten Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi Di Jawa Barat

No	Wilayah Jawa Barat	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen) 2024
1.	Kota Cimahi	8,97
2.	Kabupaten Bekasi	8,82
3.	Kota Sukabumi	8,34
4.	Kota Bogor	8,13
5.	Kabupaten Karawang	8,04
6.	Kota Bekasi	7,82
7.	Kabupaten Kuningan	7,78

Sumber : BPS Jawa Barat (2024)

Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa keberadaan industri belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan, khususnya dalam hal distribusi informasi kerja, pengawasan rekrutmen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, persoalan pengangguran di Karawang tidak hanya berkaitan dengan jumlah lapangan kerja, tetapi juga menyangkut efektivitas kebijakan publik yang dijalankan.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal melalui mekanisme rekrutmen yang lebih transparan dan terintegrasi, serta penerapan kebijakan prioritas tenaga kerja lokal. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan perusahaan, terbatasnya sosialisasi kebijakan, serta masih adanya praktik percaloan tenaga kerja.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berjalan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di daerah industri

KAJIAN TEORI

a) Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu. Menurut Dye (2013), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu, Anderson (2011) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pola tindakan yang dirancang secara sengaja oleh pemerintah dalam menangani suatu masalah. Dalam konteks ini, kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pengangguran melalui penciptaan dan distribusi kesempatan kerja yang lebih merata.

b) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Lester dan Stewart menyatakan bahwa implementasi adalah proses yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, serta prosedur untuk menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan

oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata agar memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

c). Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan peluang kerja bagi masyarakat guna mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks Kabupaten Karawang, perluasan kesempatan kerja diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016, yang menekankan penciptaan peluang kerja baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja.

d). Dimensi Implementasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati No 8 Tahun 2016 (Pasal 5,6,7,9) terdapat dimensi Perluasan kesempatan kerja yakni:

1. Arah kebijakan

Arah kebijakan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah menetapkan tujuan dan sasaran strategis dalam

memperluas kesempatan kerja. Indikator ini menekankan pada kejelasan tujuan kebijakan serta kesesuaiannya dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah.

2. Pelaksana

Pelaksana merujuk pada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan program perluasan kesempatan kerja, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pihak swasta.

3. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan merupakan implementasi nyata dari kebijakan perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait. Indikator ini meliputi penyerapan tenaga kerja lokal & sistem informasi lowongan kerja satu pintu. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang kerja serta memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam sektor industri.

4. Laporan Pelaksana

Laporan pelaksanaan merupakan bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan yang dilakukan terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala. Laporan yang baik akan menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan serta

memastikan transparansi dalam pelaksanaan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan serta dinamika yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang sebagai instansi pelaksana utama kebijakan. Fokus penelitian mencakup implementasi kebijakan yang dianalisis melalui indikator arah kebijakan, pelaksana, bentuk kegiatan, dan laporan pelaksanaan, serta faktor pendukung dan penghambat yang meliputi kepentingan, asas manfaat, budaya, aparat pelaksana, dan anggaran.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kebijakan, terdiri dari aparatur dinas terkait dan masyarakat pencari kerja. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen dan literatur relevan. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian.

HASIL & PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang

Implementasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang dianalisis berdasarkan dimensi yang ada di Perbub Karawang No 8 Tahun 2016 yakni, arah kebijakan, pelaksana, bentuk kegiatan, pelaporan pelaksana.

a. Arah Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, arah kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi daerah sebagai kawasan industri yang memiliki jumlah perusahaan yang besar serta tingkat pencari kerja yang tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja industri dengan masyarakat melalui program seperti sistem informasi lowongan kerja dan prioritas penyerapan

tenaga kerja lokal. Secara konseptual, arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki orientasi yang jelas dalam mengatasi permasalahan pengangguran.

Selain itu, arah kebijakan juga dinilai telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam membuka akses terhadap informasi lowongan kerja yang sebelumnya sulit diperoleh. Kebijakan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengetahui informasi pekerjaan secara lebih terbuka dan terstruktur. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara permintaan tenaga kerja dari industri dan ketersediaan tenaga kerja di daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara arah kebijakan dengan realitas di lapangan. Banyak perusahaan yang menetapkan kriteria tertentu seperti usia dan pengalaman kerja yang membatasi akses sebagian pencari kerja. Hal ini menyebabkan kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di luar kriteria tersebut.

Dengan demikian, meskipun arah kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasinya masih memerlukan penyesuaian agar lebih adaptif terhadap

kondisi riil pasar kerja. Kebijakan perlu dikembangkan agar tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi, tetapi juga mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik tenaga kerja di daerah.

b. Pelaksana

Pelaksana kebijakan dalam penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan perluasan kesempatan kerja. Berdasarkan hasil penelitian, aparatur pelaksana dinilai memiliki kompetensi yang cukup baik, yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan bidang tugasnya. Hal ini tercermin dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang relatif mudah diakses dan tidak berbelit-belit.

Selain itu, aparatur pelaksana juga menunjukkan sikap yang responsif dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait lowongan kerja dan program ketenagakerjaan. Kemudahan dalam mengakses layanan menjadi salah satu indikator bahwa dari sisi internal, pelaksana kebijakan telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi

juga membutuhkan peran aktif dari pihak perusahaan. Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang belum mematuhi mekanisme rekrutmen melalui sistem resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pelaksana kebijakan dengan aktor eksternal belum berjalan optimal.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan masih terhambat oleh rendahnya keterlibatan pihak perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan pengawasan agar seluruh aktor yang terlibat dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung kebijakan.

c. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dalam implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja diwujudkan melalui berbagai program, seperti sistem informasi lowongan kerja satu pintu, pelaksanaan job fair, serta pelatihan kerja bagi masyarakat. Program-program ini merupakan upaya konkret pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja. Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai.

Keberadaan program tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi pekerjaan dan

meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Job fair, misalnya, menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Demikian pula, pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

Namun demikian, efektivitas kegiatan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya partisipasi perusahaan dalam sistem informasi lowongan kerja satu pintu. Banyak perusahaan yang masih melakukan rekrutmen secara mandiri di luar sistem resmi, sehingga informasi tidak tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

Selain itu, masih adanya praktik percaloan tenaga kerja menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem rekrutmen yang transparan. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang ada belum didukung oleh pengawasan yang kuat, sehingga tujuan kebijakan untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil belum sepenuhnya tercapai.

d. Laporan Pelaksana

Laporan pelaksanaan merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi

kebijakan karena berfungsi sebagai dasar monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaporan dalam kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah.

Kurangnya pelaporan dari perusahaan menyebabkan data ketenagakerjaan yang dimiliki oleh pemerintah menjadi tidak lengkap dan kurang akurat. Kondisi ini berdampak pada kesulitan pemerintah dalam melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Tanpa data yang valid, pemerintah tidak dapat mengetahui secara pasti sejauh mana kebijakan telah berjalan dan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, lemahnya sistem pelaporan juga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal. Tidak adanya kontrol yang kuat terhadap kewajiban pelaporan menyebabkan perusahaan cenderung mengabaikan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala dalam aspek akuntabilitas

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pelaporan yang terintegrasi serta penegakan aturan yang lebih tegas

terhadap perusahaan. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik, pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih efektif, sehingga kebijakan yang dijalankan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang

Implementasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang Kebumen memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat ditinjau dari kepentingan, asas manfaat, budaya, aparatur pelaksana, anggaran sebagaimana dikemukakan Darwin.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang dapat dilihat dari aspek kepentingan, asas manfaat, dan pelaksana. Dari sisi kepentingan, terdapat keselarasan antara tujuan pemerintah daerah dengan kebijakan yang dijalankan, yaitu untuk menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, dari aspek asas manfaat, kebijakan ini memberikan dampak positif yang cukup nyata bagi masyarakat, terutama dalam kemudahan mengakses informasi lowongan kerja melalui sistem digital serta meningkatnya peluang kerja di sektor industri. Dukungan juga terlihat dari aspek pelaksana, di mana aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dinilai memiliki pembagian tugas yang jelas, tingkat kedisiplinan yang baik, serta pelayanan yang berjalan tertib. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan didukung oleh keselarasan tujuan, manfaat yang dirasakan, serta kapasitas pelaksana yang memadai.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi kebijakan dapat dilihat dari aspek budaya dan anggaran. Dari sisi budaya, hambatan muncul dari perbedaan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem layanan berbasis digital. Masyarakat yang lebih muda cenderung lebih mudah menggunakan sistem informasi lowongan kerja, sedangkan kelompok usia yang lebih tua masih mengalami kesulitan dan memerlukan pendampingan. Hal ini menyebabkan akses terhadap kebijakan belum sepenuhnya merata di semua kelompok masyarakat.

Sementara itu, dari aspek anggaran, meskipun secara umum tidak menjadi kendala utama, kondisi efisiensi anggaran tetap mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan. Beberapa program harus disesuaikan dengan kebijakan penghematan, meskipun kebutuhan utama seperti operasional dan kegiatan inti tetap dapat berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak sepenuhnya menghambat kebijakan, tetapi tetap berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah berjalan namun belum optimal. Dari aspek implementasi, arah kebijakan dinilai telah sesuai dengan kondisi daerah sebagai kawasan industri dan mampu menjawab permasalahan ketenagakerjaan. Pelaksana kebijakan juga memiliki kapasitas yang cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, bentuk kegiatan seperti sistem informasi lowongan kerja dan job fair telah memberikan kemudahan akses bagi pencari kerja. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti belum meratanya

partisipasi perusahaan serta belum optimalnya sistem pelaporan.

Selanjutnya, berdasarkan faktor pendukung dan penghambat menurut indikator Darwin, implementasi kebijakan didukung oleh keselarasan kepentingan pemerintah dengan tujuan kebijakan, manfaat yang dirasakan masyarakat dalam memperoleh akses pekerjaan, serta kinerja aparat pelaksana yang cukup baik. Sementara itu, faktor penghambat utama terletak pada aspek budaya dan anggaran. Dari sisi budaya, masih terdapat kesenjangan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem digital, khususnya pada kelompok usia yang lebih tua. Dari sisi anggaran, meskipun tidak menjadi kendala utama, adanya kebijakan efisiensi tetap mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara faktor pendukung dan kemampuan dalam mengatasi hambatan yang ada.

SARAN

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan penggunaan sistem informasi lowongan kerja, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi. usia yang lebih tua, agar dapat mengakses layanan secara optimal.
2. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan perusahaan agar proses rekrutmen dilakukan melalui sistem resmi sehingga lebih transparan dan merata.
3. Perlu peningkatan sistem pelaporan dan pengawasan agar data ketenagakerjaan lebih akurat dan dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan.
4. Pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara efektif agar seluruh program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Ardian, R., Syahputra, M., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(3), 190-198.
- Audania, N., & Febrian, R. A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelawan Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Pangkalan Kerinci
- Blanco, Y. O., & Hardjati, S. (2024). Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

- Sidoarjo dalam Mengurangi Angka Pengangguran. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 867-878.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83-88.
- Faradis, N. A., & Indarjo, S. (2018). Implementasi Kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(2), 307-319.
- Hidayat, Y., Fahrul Rizal, L., & Saptaji, A. (2024). Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasa Dusturiyah. *UNES Law Review*, 6(4), 11809-11817.
- Landon, A. CARES Act Unemployment Insurance Program Implementation in Kentucky: A Case Study.
- Lestari, A., & Arifin, J. (2021). *Implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) untuk penanggulangan kemiskinan dilihat dari aspek komunikasi di Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur*. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPB), STIA Tabalong*.
- Lafina, A. R., Sholichah, N., & Wardhono, H. (2023). Implementasi Program Padat Karya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Dalam Perspektif Collaborative Governance di Kelurahan Manyar Sabrangan Kota Surabaya. *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 7(2), 158-172.
- Nuraini, S., & Puspitasari, D. (2022). Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Di Masa Pandemi Covid-19. *Governance*, 10(2), 49-64.
- PRIYANA, D., & Juwita, M. N. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kota Bandar Lampung (Doctoral dissertation, Universitas Bandar Lampung).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.

- Pratiwi, R., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Cak E-MUS (Cangkrukan Entrepreneur Muda Surabaya) dalam Mengembangkan Dunia Bisnis yang Memberdayakan Anak Muda Surabaya. *Publika*, 9(3), 294-306.
- Sururi, M. P., Hafidh, Z., & Afifah, D. A. (2023). *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis dan Model Implementasi Kebijakan Edwards III*. Indonesia Emas Group.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10(2), 121-130.
- Suryana, N., Brata, Y. R., & Mulyanti, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penuntasan Kemiskinan Di Kota Banjar. *Case Law: Journal of Law*, 3(2), 121-129.
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1059-1068.